



**RILIS**  
**KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN**  
**KOMISI X DPR RI**  
**KE KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024—2025**  
**TANGGAL 28—30 NOVEMBER 2024**

=====

Komisi X DPR RI melaksanakan Kunker Spesifik Bidang Pendidikan ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 tanggal 28-30 November 2024, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman. Kunker Spesifik ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi dari Pemerintah Kota Makassar dan para pemangku kepentingan pendidikan di Kota Makassar, melihat secara langsung pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Kunjungan diterima oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Irwan Bangsawan, Kepala Dinas Pendidikan Muhyiddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan para pelaku pendidikan se-Kota Makassar. Kunjungan kerja ini juga dilakukan dengan peninjauan lapangan ke SMP Negeri 6 Makassar. Pada kunjungan ke SMP Negeri 6 Makassar, beberapa kendala yang mengemuka adalah adanya *over capacity* daya tampung siswa akibat banyaknya siswa yang berminat. Saat ini siswa yang terdaftar adalah 1.433 siswa, jauh melebihi kapasitas yang tersedia, dan terdapat 166 siswa yang tidak terdaftar di Dapodik karena melebihi daya tampung sekolah. Pihak sekolah tengah mengupayakan pendaftaran bagi siswa yang belum masuk Dapodik tersebut. Kepala Sekolah Munir, mengatakan agar sekolah dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, seharusnya jumlah siswa tidak boleh melebihi kapasitas sekolah. Ia setuju agar PPDB Zonasi dipertahankan sehingga sekolah tidak *over capacity*.

Pencegahan dan penanganan kekerasan di Kota Makassar tergolong baik. Pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP, secara umum dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi satuan tugas di sekolah untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan. Namun, pemerintah daerah perlu mendukung implementasi aturan ini melalui pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan terkait deteksi dini dan respons terhadap kekerasan. Selain itu, sosialisasi kepada siswa dan orang tua tentang hak anak untuk merasa aman di lingkungan sekolah sangat penting. Pemanfaatan kanal pengaduan yang mudah diakses dan responsif juga harus diperkuat, diiringi pengawasan yang transparan serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga pendamping anak untuk menyelesaikan kasus secara adil dan berkeadilan.

Secara umum Komisi X DPR RI mengapresiasi keberhasilan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan di Kota Makassar, dan meminta merekomendasikan agar “kampanye anti-bullying”, dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen sekolah, orang tua, dan masyarakat. Komisi X DPR RI mendukung langkah perlindungan bagi anak-anak dari paparan konten berbahaya di media sosial, yang ujungnya dapat menimbulkan perilaku kekerasan.

Makassar, 30 November 2024

Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.